

PERSPEKTIF SEJARAH REFORMASI EKONOMI CHINA

Konrad Punyaman Ndruru

Universitas Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia

Email: Kondrad129@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

10 Desember 2023

Revised

06 Januari 2024

Accepted

23 Januari 2024

Kata-kata Kunci:

China; Ekonomi; Ekonomi
China; Reformasi.

Keywords: China; Economy;
Chinese Economy;
Reformation.

Abstrak

Reformasi ekonomi China yang dimulai pada akhir tahun 1970-an telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan kinerja ekonomi negara tersebut. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan memperkuat peran China di pasar global. Namun, reformasi ekonomi China juga menghadapi beberapa tantangan. Pertumbuhan yang cepat telah menyebabkan ketimpangan regional, kesenjangan pendapatan, dan masalah lingkungan. Selain itu, China juga menghadapi tekanan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan ketidakseimbangan perdagangan dengan beberapa negara. Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah berusaha untuk mengubah model pertumbuhan ekonominya dengan menggeser fokus dari investasi dan ekspor ke konsumsi domestik dan inovasi. Pemerintah China telah meluncurkan inisiatif seperti "Made in China 2025" dan "Belt and Road Initiative" untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dan meningkatkan konektivitas regional. Secara keseluruhan, reformasi ekonomi China telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengubah ekonomi negara tersebut. Namun, tantangan dan perubahan yang terus menerus ada, dan China dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Abstract

China's economic reforms that began in the late 1970s have brought about significant changes in the structure and performance of the country's economy. The main goals of these reforms are to achieve sustainable economic growth, improve the quality of life of the population, and strengthen China's role in the global market. However, China's economic reform also faces several challenges. Rapid growth has led to regional inequality, income disparities, and environmental problems. Apart from that, China is also facing pressure in terms of protecting intellectual property rights and trade imbalances with several countries. In recent years, China has also attempted to change its economic growth model by shifting the focus from investment and exports to domestic consumption and innovation. The Chinese government has launched initiatives such as "Made in China 2025" and the "Belt and Road Initiative" to encourage the growth of strategic sectors and improve regional connectivity. Overall, China's economic reforms have had a significant impact in transforming the country's economy. However, ongoing challenges and changes remain, and China is faced with the complex task of maintaining sustainable growth.

PENDAHULUAN

Setelah 43 tahun pelaksanaan reformasi dan kebijakan keterbukaan China, yang diluncurkan di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, kebijakan ini memulai transformasi China dari ekonomi tertutup dan terpusat bercirikan ekonomi komunis menjadi kekuatan ekonomi yang semakin berorientasi kepada pasar global (Khasanah, 2022). Namun keberhasilan itu dibayangi oleh tantangan saat ini dalam ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian arah reformasi ekonomi. Pada tahun 2018, tercatat ekonomi China tumbuh pada tingkat paling lambat sejak 1990, dan China terlibat dalam perang dagang dengan AS (Hennida, 2014). Pada saat yang sama, ekonomi telah berkembang ke titik di mana model pertumbuhan yang sudah mapan tidak lagi dapat dipertahankan. Untuk memahami perkembangan ekonomi politik China saat ini dan di masa depan, perlu sekali mengetahui bagaimana reformasi ekonomi China di bangun selama ini.

Pada pertengahan 1970-an, China merupakan negara dengan sistem ekonomi yang sangat terpusat yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah dan Partai Komunis China. Model sosialis ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi China, mengakibatkan inflasi tinggi, kekurangan bahan makanan, keterbelakangan teknologi, dan kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengambil langkah-langkah awal dalam reformasi ekonomi China yang bertujuan untuk mengatasi kegagalan sistem ekonomi sosialis yang telah diterapkan selama Revolusi Kebudayaan. Reformasi ekonomi China dimulai dengan pembebasan pertanian (Santoso, 2017). Sebagian besar petani di China pada saat itu hidup dalam komune pertanian kolektif yang tidak efisien. Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan hak kepada petani untuk mengelola tanah mereka sendiri dan menjual surplus hasil panen mereka di pasar. Langkah ini memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan, yang pada gilirannya meningkatkan produksi pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, China mendirikan Zona Ekonomi Khusus pertama di Shenzhen, dekat perbatasan dengan Hong Kong (Neftci dan Menager-xu, 2006). Zona Ekonomi Khusus ini menjadi magnet bagi investasi asing dan menjadi model untuk pembukaan ekonomi China ke luar negeri. Pemerintah memberikan insentif dan kebijakan yang lebih fleksibel kepada perusahaan asing yang beroperasi di zona ini, termasuk kebijakan pajak yang menarik. Selanjutnya, China juga mengembangkan sektor industri melalui reformasi ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan dan insentif kepada sektor swasta asing untuk berinvestasi di sektor industri seperti manufaktur dan teknologi informasi. China berkembang menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia dalam beberapa dekade berikutnya. Reformasi ekonomi China juga melibatkan perubahan dalam sektor perbankan dan keuangan. China mendirikan bank-bank komersial modern dan memperkenalkan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar modal China berkembang secara signifikan, memberikan akses pendanaan yang lebih baik bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat.

Reformasi ekonomi China selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. China telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global dengan pangsa yang signifikan dalam produksi, ekspor, dan menjadi tujuan investasi bagi perusahaan multinasional. Meskipun demikian, reformasi ini juga menghadapi beberapa masalah, termasuk ketimpangan pendapatan, tekanan lingkungan, dan ketidaksetaraan regional. Secara keseluruhan, reformasi ekonomi China telah mengubah drastis perekonomian negara tersebut dan meningkatkan taraf hidup ratusan juta orang. Langkah-langkah ini membuktikan pentingnya memperkenalkan pasar dan liberalisasi ekonomi dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seperti yang telah dilakukan oleh China.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang reformasi ekonomi China yang meningkat pesat dari perspektif sejarahnya. Pendekatan deskriptif ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana China melakukan reformasi ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersumber dari literatur akademik, laporan pemerintah, laporan lembaga internasional, dan sumber berita yang kredibel. Data sekunder ini akan membentuk dasar analisis dan memastikan kesesuaian serta kelengkapan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan reformasi dan keterbukaan ekonomi China merupakan program untuk memperkenalkan dan memajukan bisnis-bisnis swasta dan insentif pasar kepada sistem komunis yang dipimpin pemerintah China. Sebelum tahun 1978, sektor swasta hampir tidak dikenal di seluruh China. Setelah dilakukan reformasi perusahaan swasta berkontribusi sekitar 70 persen dari PDB China (Kroeber, 2020). Untuk sampai ke titik ini, China mengalami perombakan besar pada sistem ekonominya selama 40 tahun terakhir. Walaupun mengalami banyak perubahan di setiap sendi ekonominya termasuk dengan beberapa eksperimentalisme, reformasi ekonomi China tetap difokuskan secara bertahap pada jangka waktu tertentu, sehingga tetap mengutamakan keteraturan seperti yang menjadi cita-citakan Partai Komunis China. Efek dari Revolusi Kebudayaan 1966-1976 sangat tidak menguntungkan secara ekonomi bagi rakyat China. Partai Komunis China dan pemerintah harus mengubah arah agar mendapat dukungan dari rakyat China. Menyusul peristiwa meninggalnya ketua Partai Komunis, Mao Zedong yang menggagas Revolusi Kebudayaan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada arah kebijakan Negara. Setelah popularitas “Gang of Four” menurun, (Kelompok yang terdiri dari empat pimpinan tinggi Partai Komunis China yaitu Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, dan Wang Hongwen). Deng Xiaoping mulai memimpin permukaan untuk memperbaiki perekonomian China, hal ini terjadi setelah kepemimpinan Partai teratas mendukungnya. Perubahan ini sesungguhnya telah di rencanakan mulai 1960-an, sesuai dengan pernyataan Partai Komunis di tahun 1964. Mereka mengumumkan akan mengembangkan ekonomi Cina sesuai dengan ketetapan dalam empat poin modernisasi yaitu modernisasi bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peradilan atau layanan masyarakat.

Partai Komunis berpendapat bahwa rencana modernisasi tersebut terganggu oleh Revolusi Kebudayaan 1966-1976, dan harus dilanjutkan segera setelah Revolusi Kebudayaan mereda. Tentu saja sebuah revolusi akan mempengaruhi perekonomian, maka dimulailah proyek percobaan untuk menemukan system terbaik dari tahun 1976. Model awal uji coba adalah sekelompok petani yang menjadi percontohan di desa Xiaogang provinsi Anhui yang menciptakan Sistem Tanggung Jawab Kontrak Rumah Tangga yang menggantikan Sistem Komunal Rakyat dan merangsang antusiasme dan inovasi petani, yang secara bertahap didukung oleh pemangku kebijakan daerah. Dengan keberhasilan Desa Xiaogang, maka dicetuskanlah konsep zona ekonomi khusus yang pertama kali didirikan sebagai tempat tidur uji di empat kota pesisir yaitu Kota Shenzhen, Kota Zhuhai, dan Kota Shantou di Provinsi Guangdong, satu lagi kota yang berstatus zona ekonomi khusus adalah Kota Xiamen di Provinsi Fujian. Keempat kota yang di pilih berkewajiban mengeksplorasi system pendekatan kepada trend pasar global untuk membuka dan menyediakan platform bagi system reformasi di seluruh Cina. Dengan uji coba system baru, rakyat china sangat antusias. Deng Xiaoping pun mendapat dukungan untuk terus mengembangkan kebijakan baru.

Alasan dukungan atas uji coba keterbukaan ekonomi ini berdasarkan 3 point utama, pertama, banyak perencana ekonomi telah belajar dari pengalaman bahwa sistem lama sulit dikelola dan tidak efisien secara ekonomi (Stent, 2016). Hal ini dibenarkan oleh kajian para pejabat ekonomi yang muncul pada akhir 1970-an, meskipun pemahaman tentang kelemahan sistem perencanaan bervariasi di antara para pejabat ini. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara sekitar China yang lebih berorientasi pada pasar, menjadi contoh bahwa ekonomi pasar dapat berkinerja lebih baik. China mulai berkaca pada system ekonomi terbuka yang lebih dulu di terapkan di wilayah otonom seperti Hong Kong dan Taiwan, relative lebih maju di banding Negara induknya.

Mereka juga lebih terbuka pada pendapat dimana sistem ekonomi liberal seperti di Korea Selatan lebih maju dibandingkan system ekonomi komunis terpusat yang berjalan di Korea Utara, juga pengalaman pertumbuhan antara Jerman Timur dan Barat menjadi penguat dukungan bagi perubahan system di China. Ketiga, keinginan mayoritas rakyat Cina untuk reformasi system yang lebih mendukung kehidupan bisnis. Rakyat Cina juga menderita konsekuensi ekonomi dari system ekonomi terpusat, termasuk kekurangan barang konsumsi, terbatas nya pilihan barang dan kurangnya peningkatan kualitas. Mereka harus tunduk kepada pemasok barang-barang konsumen dan menunggu dalam antrean panjang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Mereka harus menggunakan koneksi pribadi untuk mendapatkan apa yang dianggap sebagai barang konsumen penting. Sehingga system ekonomi lama ini sangat membuat subur praktik korupsi dan nepotisme.

Karir Politik Deng Xiaoping, Pencetus Reformasi Ekonomi China

Deng Xiaoping adalah putra seorang tuan tanah, sehingga keluarganya cukup mampu untuk membiayai studi Deng Xiaoping di Prancis (Adimurni, 2017). Studinya perguruan tingginya di tempuh dari tahun 1920 hingga 1924, Setelah kembali ke China dia langsung terlibat aktif dalam gerakan komunis China, dan di Uni Soviet (1925–1926). Di tahun berikutnya Deng sudah menjadi aktivis politik dan militer terkemuka di salah satu badan otonom Partai Komunis China yaitu Soviet Jiangxi. Karir politik Deng Xiaoping sangat mulus hingga tahun 1937 sampai dengan 1945 ia menjabat sebagai komisaris (perwira politik) dari divisi Angkatan Darat Rute Kedelapan komunis, pada periode itu juga itu ia diangkat sebagai sekretaris Komite Pusat Partai Komunis China (PKC). Pertengahan 1950-an Deng menjadi pembuat kebijakan utama dalam urusan luar negeri. Posisi ini membuat dia memiliki komunikasi yang baik dengan para pimpinan PKC yang menekankan penggunaan insentif material dan pembentukan elit teknis dan manajerial yang terampil dalam pembangunan ekonomi China dengan pihak swasta dalam hal ini dari luar negeri. Dengan demikian kedekatan Deng dengan swasta menjadi sorotan para pimpinan PKC, serta menyulut konflik dengan Mao Zedong. Konflik ini terjadi bukan hanya karena faktor kedekatan Deng Xiaoping dengan pihak swasta, namun juga pertentangan pemikiran Mao yang menekankan kebijakan antusiasme revolusioner sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, dengan pemikiran Deng pada perkembangan bisnis swasta dan individu yang seharusnya dapat menopang perekonomian China.

Deng Xiaoping mendapat banyak tekanan dalam karir politiknya selama Revolusi Kebudayaan (1966–1976). Namun pada tahun 1973, Deng mendapat perlindungan Perdana Menteri Zhou Enlai dan menjadi wakil perdana menteri, dan pada tahun 1975. Perlindungan tersebut tidak berlangsung lama, Januari 1976 Zhou Enlai meninggal dunia. Sesegera mungkin Gang of Four—elit pendukung Mao, berhasil menjatuhkan Deng Xiaoping. Pada Juli 1977 Deng telah kembali ke jabatan tingginya, setelah kematian Mao dia segera memulai perjuangan untuk mengendalikan partai dan pemerintahan. Keterampilan politik Deng yang unggul dan basis dukungan yang luas segera membuat para pimpinan pro Mao menyerahkan jabatan utama untuk kolega Deng Xiaoping pada 1980–1981. Zhao Ziyang menjadi perdana menteri pemerintah, dan Hu Yaobang menjadi sekretaris umum PKC keduanya merupakan kolega Deng Xiaoping yang bertarung di puncak pimpinan atas petunjuk Deng. Sejak saat itu, Deng melanjutkan untuk menjalankan kebijakannya sendiri untuk pembangunan ekonomi China.

Berjuang untuk kebijakan reformasi ekonomi melalui konsensus, kompromi, dan persuasi, Deng mengatur reformasi dalam hampir semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Tiongkok. Reformasi sosialnya yang paling penting adalah institusi program keluarga berencana paling ketat di dunia yaitu kebijakan satu anak, untuk mengendalikan populasi China yang sedang berkembang. Dia melembagakan pengelolaan ekonomi yang terdesentralisasi dan perencanaan jangka panjang yang rasional dan fleksibel untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien dan terkendali. Petani petani Tiongkok diberi kendali dan tanggung jawab atas produksi dan keuntungan mereka, beberapa tahun dari inisiasinya pada tahun 1981. Deng berfokus pada pengaturan tanggung jawab individu / swasta dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan pembentukan sumberdaya manusia yang terampil dan berpendidikan baik untuk menjadi ujung tombak pembangunan China. Dia membebaskan banyak perusahaan industri dari kontrol yang terlalu ketat, namun tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat dan memberi manajemen industri wewenang untuk menentukan tingkat produksi dan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan mereka sendiri. Dalam urusan luar negeri, Deng memperkuat hubungan perdagangan dan budaya China dengan Barat dan membuka perusahaan Cina untuk investasi asing.

Komponen Reformasi Ekonomi China

Ada beberapa komponen yang mengalami reformasi dan berpengaruh pada ekonomi China terjadi diantaranya adalah pertanian reformasi dibidang pertanian ini dimulai pada tahun 1978 beberapa reformasi kelembagaan besar di China telah dilakukan. Pertama adalah adopsi sistem tanggung jawab manajemen di bidang pertanian (Sukmanjara, 2023). Pertanian kolektif di bawah sistem Komune yang diperkenalkan oleh Mao pada tahun 1958 dalam Gerakan Lompatan Besar sudah lama dipraktikkan secara masif. Dalam gerakan yang kolektif petani diwajibkan pemerintah China untuk bekerja sebagai tim. Satu tim petani terdiri dari empat puluh orang. Seorang petani tidak bisa mendapatkan imbalan ekstra, walaupun bekerja lebih keras atau waktu yang lebih panjang. Hal tersebut karena semua anggota tim akan berbagi semua penghasilan, bahkan jika ada yang bekerja ekstra untuk mendapatkan penghasilan ekstra maka harus di bagi juga kepada seluruh tim. Dengan system lama tersebut petani Cina hidup dalam keterbatasan, dan tidak ada semangat kompetitif untuk menaikkan produksinya. Beberapa petani menyadari bahwa jika mereka bertani secara terpisah tim dapat menghasilkan lebih banyak secara

total dan masih menyampaikan jumlah penghasilan yang sama yang diperlukan oleh penghasilan produksi minimal untuk produk pertanian pemerintah dalam system ekonomi China. Reformasi badan usaha milik negara di Cina adalah contoh pendekatan bertahap untuk reformasi ekonomi melalui uji coba. Dalam hal ini, perubahan kelembagaan diadopsi dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang pertama adalah memberikan BUMN beberapa otonomi dalam produksi, pemasaran dan keputusan investasi. Berbeda dari system sebelumnya yang hanya melaksanakan keputusan pusat. Percobaan ini dimulai pada akhir tahun 1978 dengan enam BUMN di Provinsi Sichuan sebagai contohnya. Maka untuk keadilan dan daya saing untuk meningkatkan produksi, sistem komune diubah. Maka petani dalam system baru bertani secara terpisah, masing-masing dapat mengumpulkan hasil tambahan untuk tenaga lebih yang dikeluarkan. Tentunya setelah memberikan sejumlah produksi minimum tetap kepada lembaga pengadaan pemerintah China.

Dalam kebijakan kebijakan terbuka yang di sebut Deng Xiaoping sebagai “pintu terbuka”, perdagangan luar negeri dan investasi asing diusahakan untuk di tingkatkan. Ekonomi China pada dasarnya adalah ekonomi tertutup sebelum reformasi ekonomi. Pada tahun 1978, total volume perdagangan luar Negerinya, atau jumlah nilai ekspor dan impornya, hanya sebesar 7% dari pendapatan nasionalnya. Kebijakan pintu terbuka Deng Xiaoping mendorong China untuk membuka diri terhadap impor asing dan promosi ekspor. Pada tahun 1987, volume perdagangan luar negeri meningkat menjadi 25 % dan pada tahun 1998 menjadi 37 % dari produk domestik bruto (Khalidun, Sari dan Ismira, 2023).

Reformasi sistem harga dilakukan sebagai bagian dari Keputusan Komite Pusat Reformasi Ekonomi yang diadopsi pada Oktober 1984, yang mencakup tiga komponen sebelumnya juga. Tujuan utamanya adalah untuk mendekontrol harga yang ditentukan secara administratif secara bertahap, sehingga memungkinkan harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Tanpa penetapan harga pasar, BUMN tidak menerima sinyal yang benar untuk melakukan perhitungan ekonominya dalam pilihan input dan perencanaan output. Namun, harga yang diberikan tidak dapat segera didekrolrolkan. Pertama, ada masalah ekuitas. Ada beberapa yang harus pemerintah perhatikan terlebih dulu, seperti harga barang konsumsi pokok, jika di lepas tanpa bantuan control pemerintah akan mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Kedua, akan ada gangguan dalam produksi BUMN jika dipasok dengan input harga yang tidak sesuai dengan harga umum pasar.

Sistem pemukiman yang dikendalikan negara diubah menjadi sistem kontrak rumah tangga pertanian sehingga petani dapat mengelola lahan mereka sendiri dan memiliki kebebasan dalam menanam serta menjual produk mereka. Ini meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Deng Xiaoping juga membuka pasar saham dan membentuk berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan milik negara dengan manajemen yang lebih independen serta perusahaan swasta yang berfokus pada keuntungan. Hal ini mendorong sektor bisnis dan sektor swasta yang kuat di negara tersebut. China juga memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara lain, terutama melalui World Trade Organization (WTO) yang memberikan akses yang lebih besar ke pasar global.

Liberalisasi Sektor Keuangan

China telah menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi ekonomi negara ini. China telah melihat perlunya untuk membuka sektor keuangan dan mengurangi intervensi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan akses ke kredit, mengembangkan pasar modal yang lebih kuat, dan mengurangi risiko melalui pengaturan perbankan yang lebih baik. Beberapa aspek penting dalam liberalisasi sektor keuangan China seperti liberalisasi suku bunga dimana China telah melangkah untuk meliberalisasi suku bunga agar bank-bank dapat menetapkan suku bunga mereka sendiri (Kurniawan, Sari dan Fauziah, 2024). Sebelumnya, suku bunga ditetapkan oleh pemerintah, yang mengakibatkan kebijakan moneter yang tidak efisien dan tidak akurat. Liberalisasi suku bunga ini akan membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di sektor keuangan China.

Liberalisasi perbankan berbasis risiko dimana China telah berusaha untuk mengembangkan sebuah sistem perbankan yang lebih berbasis risiko. Sebagai bagian dari upaya ini, China telah memperkenalkan metode pengukuran risiko yang lebih baik bagi bank-bank dan telah mendorong bank-bank untuk meningkatkan modal mereka agar dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Reformasi ini bertujuan untuk mendorong bank-bank untuk membuat keputusan pinjaman yang lebih sehat dan mengurangi risiko keuangan.

Pengembangan lembaga keuangan non-bank dimana selain sektor perbankan, China juga telah berupaya untuk mengembangkan lembaga keuangan non-bank yang lebih maju. Hal ini meliputi

pengembangan pasar modal yang lebih aktif, termasuk pasar saham dan pasar obligasi yang berkembang pesat. China juga telah mendorong perkembangan lembaga keuangan seperti lembaga modal ventura, lembaga reksa dana, dan lembaga pembiayaan jangka panjang. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi sumber pembiayaan dan memberikan lebih banyak pilihan untuk pemodal.

Peningkatan kepatuhan dan transparansi dimana salah satu upaya penting dalam liberalisasi sektor keuangan China adalah meningkatkan kepatuhan dan transparansi. China telah meluncurkan langkah-langkah untuk memperkuat aturan pajak, melaksanakan audit yang lebih ketat, dan meningkatkan pengawasan bank-bank. Pemerintah juga telah memperkenalkan prinsip-prinsip transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih baik.

Keterlibatan asing dimana China telah membuka pintu bagi perusahaan asing untuk beroperasi di sektor keuangan negara ini. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah termasuk penghilangan batasan kepemilikan asing pada sektor keuangan, memperluas akses perusahaan asing ke pasar saham dan obligasi China, serta memberikan kemudahan bagi perusahaan asing untuk meluncurkan lembaga keuangan mereka sendiri di China.

Transformasi Sektor Industri

Peran sektor industri dalam transformasi ekonomi China sangat penting. Seiring dengan reformasi ekonomi, sektor industri di China mengalami perubahan yang signifikan dari fokus pada produksi berbasis pertanian dan industri berat, menjadi sektor industrinya yang lebih beragam dan berbasis teknologi tinggi (Haq, 2022). Salah satu langkah pertama dalam transformasi sektor industri China adalah memperkenalkan kebijakan pengembangan zona ekonomi khusus. Pada tahun 1980, pemerintah China membuka empat zona ekonomi khusus di kota Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Zona-zona ekonomi ini memiliki kebijakan insentif yang mendorong investasi asing dan kerjasama dengan perusahaan asing. Langkah ini berhasil menarik investor asing dan teknologi asing ke China, yang membantu mengembangkan sektor industri yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Pemerintah China jugamemberikan perhatian besar pada pengembangan sector manufaktur. Pada tahun 1990-an, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan dan insentif untuk mendorong transformasi sektor manufaktur menjadi lebih efisien dan berorientasi ekspor. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur China di pasar internasional. Pengembangan sector manufaktur ini terutama terfokus pada industri yang membutuhkan tenaga kerja, seperti tekstil, elektronik, komponen otomotif, dan peralatan dapur. Selain itu, pemerintah China juga memberikan dukungan untuk pengembangan sektor teknologi tinggi dan inovasi. Melalui program-program seperti "Made in China 2025" dan "Belt and Road Initiative", pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Langkah ini bertujuan untuk membantu China memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global melalui inovasi teknologi dalam sektor industri seperti komputer, telekomunikasi, perangkat keras, dan teknologi energi. Ini adalah bagian dari strategi China untuk beralih dari menjadi pusat produksi murah ke negara yang memimpin dalam teknologi tinggi dan inovasi. Transformasi sektor industri juga melibatkan perubahan dalam hubungan buruh dan perlindungan tenaga kerja. Seiring dengan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri, kondisi dan hak pekerja juga mengalami perbaikan. Pemerintah China memperkuat hukum ketenagakerjaan, memberikan perlindungan dan hak yang lebih besar kepada pekerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan serikat buruh yang independen untuk mewakili kepentingan pekerja. Secara keseluruhan, sektor industri China telah mengalami transformasi yang signifikan sejak reformasi ekonomi dimulai. Pemerintah telah memainkan peran sentral dalam mengalihkan fokus industri dari produksi berbasis pertanian dan industri berat ke sektor yang lebih modern dan berbasis teknologi tinggi. Melalui langkah-langkah ini, China telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam sektor industri global dan meningkatkan daya saing ekonominya secara keseluruhan.

Transformasi Ekonomi Terhadap Dampak Sosial

Transformasi ekonomi memberikan beberapa dampak sosial pada masyarakat China seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup masyarakat dimana reformasi ekonomi di China telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang kuat, China berhasil mengangkat jutaan orang dari garis kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Reformasi ekonomi juga telah membuka peluang bagi pengembangan sektor swasta dan kewirausahaan, yang berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Penguatan posisi China di arena ekonomi global melalui reformasi ekonomi, China telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ekspansi perdagangan dan investasi asing serta kebijakan liberalisasi telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam peran ekonomi China di pasar global. China juga menjadi salah satu anggota paling berpengaruh di organisasi ekonomi internasional seperti WTO (World Trade Organization) dan mendapatkan pengaruh yang lebih besar dalam hubungan dagang dan diplomasi internasional.

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan juga terjadi akibat reformasi ekonomi, meskipun reformasi ekonomi telah memberikan manfaat besar bagi sebagian besar masyarakat, perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan tetap menjadi masalah yang signifikan. Perkembangan ekonomi yang lebih cepat di perkotaan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin membesar antara dua wilayah tersebut. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan juga masih lebih terbatas di pedesaan.

Dampak sosial reformasi ekonomi di China memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sementara pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup masyarakat menjadi prestasi yang signifikan, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

PENUTUP

Reformasi ekonomi di China telah membawa perubahan besar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, masalah korupsi, dan kerentanan terhadap perubahan ekonomi global. Pada masa depan, China perlu terus melanjutkan reformasi ekonomi dengan

memperhatikan kesetaraan dan keberlanjutan. Peningkatan regulasi dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik juga menjadi prioritas yang penting. China juga harus mampu mengatasi ketegangan dalam hubungan perdagangan dan politik internasional serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat menguntungkan seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A, Nurjannah Y. Mao Zedong: Kisah Sang Revolusioner Budaya Cina. Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Haq, Muhammad Fajrul. "Pembangunan Infrastruktur Pakistan Dalam Proyek China And Pakistan Economic Corridor (CPEC) Periode 2015-2020." bachelorThesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71484>.
- Hennida, Citra. "Upaya Tata Kelola Lingkungan di Cina: Hambatan-hambatannya," no. 2 (2014).
- Ibnu Khaldun, Riady, Ratna Sari, and Andi Ismira. "Retaliasi China Terhadap Amerika Serikat Dalam Konteks Perang Dagang." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 68–81. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27661>.
- Khasanah, Umrotul. *Ekonomi Islam: Reformulasi sistem keuangan syariah*. Edited by Zis Muzahid and Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono. Malang: Inara Publisher, 2022. <http://repository.uin-malang.ac.id/12992/>.
- Kroeber, Arthur R. *China's Economy: What Everyone Needs to Know®*. Oxford University Press, 2020.
- Kurniawan, Muchammad Akbar, Dinda Novita Sari, and Nailul Fauziyah. "Tinjauan Terhadap Kebijakan Ekonomi Tiongkok Sebagai Pemuncak Global." *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, no. 1 (January 21, 2024): 30–39. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v3i1.6360>.

- Kurniawati, Renny, and Nawiyah. *Budaya, Politik, Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*. PT.Scifintech Andrew Wijaya, n.d.
- Neftci, Salih N., and Michelle Yuan Menager-Xu. *China's Financial Markets: An Insider's Guide to How the Markets Work*. Elsevier, 2006.
- Santoso, Bambang. "Kebangkitan Ekonomi China Dan Pengaruhnya Terhadap Beberapa Negara Di Kawasan Asia." *GLOBAL INSIGHT JOURNAL* 2, no. 1 (September 8, 2017). <https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1657>.
- Stent, James. *China's Banking Transformation: The Untold Story*. Oxford University Press, 2016.
- Sukmaniara, Maria Averista Florensa Gracia. "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meningkatkan Kerja Sama Ekspor Non Migas Komoditas Karet Alam ke China (2017-2022)." S1, Universitas Kristen Indonesia, 2023. <http://repository.uki.ac.id/13456/>.